



**PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN DALAM MENGUPAYAKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN
CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI**

Velia Ulfah, Haura Atthahara, Rachmat Ramdani

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin. Maka dari itu penelitian ini bertujuan dalam menganalisa dan menjelaskan gambaran pelaksanaan program beras rumah tangga miskin atau raskin di Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Raskin atau beras untuk rumah tangga miskin merupakan program bantuan beras bersubsidi dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau rumah tangga sasaran. Berdasarkan pengamatan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif menyebutkan bahwa masih banyak ditemui hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program Raskin tersebut. Diantaranya yaitu karena program ini tidak tepat sasaran, kualitas beras raskin tidak layak untuk dikonsumsi, tidak meratanya dalam pembagian Raskin, kurangnya sosialisasi, kurangnya pengawasan dari pihak instansi Pemerintah dan ataupun para pelaksana yang terkait di lapangan.

Kata Kunci: Kebijakan Beras Miskin, Program Raskin.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi negara tersebut. Pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar, sehingga memiliki sifat strategis dalam pembangunan, baik tingkat nasional maupun wilayah. Sejalan dengan itu,

pembangunan sudah menjadi bagian dari proses terbentuknya peradaban manusia. Tujuan dari pembangunan di indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat indonesia seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945.

Indonesia sering disebut sebagai negara agraris yang memiliki dua musim kondisi iklim yaitu panas dan musim hujan sehingga masyarakat Indonesia sebagian besar bermata pencaharian disektor pertanian dan perkebunan sebagaimana tumbuhan cocok dalam kondisi iklim tropisnya dan faktor lainnya tanah Indonesia umumnya memiliki kandungan humus dalam tanah yang menyebabkan tanah di Indonesia menjadi subur, selain itu Indonesia menduduki peringkat pertama yang memiliki gunung api aktif berjumlah 127 sehingga menghasilkan tanah baru dan debu baru hasil dari letusan yang mampu menyuburkan tanah. Hal ini Indonesia memiliki kondisi alam yang mendukung dan sumber daya alam yang mendukung sektor pertumbuhan agraris namun sebagian besar masyarakat Indonesia kurang dalam kebutuhan pangannya dan tidak hidup sejahtera mengakibatkan pemerintah Indonesia justru mengambil tindakan dengan meminta bantuan dari negara lain, melalui kebijakan kementerian perdagangan telah membuka impor beras pada tahun 2018 sebanyak 500.000 ton yang akan di impor dari negara Vietnam dan negara Thailand hal ini dilakukan untuk menambah persediaan beras yang akhir-akhir ini mengalami penurunan (Tribun Bisnis, 2021:8).

Upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin khususnya di Kecamatan Cikarang Utara terus dilaksanakan, antara lain melalui program-program kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi salah satunya beras untuk rumah tangga miskin atau disingkat (Raskin).

Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian atau Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait

bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program Raskin. Pelaksanaan distribusi Raskin merupakan tanggung jawab dua lembaga, yakni Bulog dan Pemerintah Daerah (Pemda). Bulog bertanggung jawab terhadap penyaluran beras hingga titik distribusi, sedangkan Pemda bertanggung jawab terhadap penyaluran beras dari titik distribusi hingga rumah tangga sasaran.

Guna kelancaran penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) Raskin tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Cikarang Utara melalui Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaannya melakukan upaya sosialisasi terus menerus mengenai data terbaru kepada penerima manfaat, khususnya di daerah-daerah apabila mengalami pengurangan, dan bekerja sama dengan aparat tingkat kelurahan sampai desa-desa penerima Raskin.

Hutasoit, (2018:76) mengemukakan bahwa proses aplikasi kebijaksanaan (policy implementation) artinya proses yang dapat panjang dan meluas guna tercapainya tujuan kebijaksanaan itu merupakan terhadap masyarakat, dan warga ini memiliki sifatnya yang berkembang menggunakan kesadaran nilai-nilai yang berkembang pula. Pada pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, maka wujud kegiatan orang-orang yg dipimpin itu merupakan partisipasi rakyat (citizen participation) yg sah- sah adalah kondisi yg krusial serta perlu (relevant) buat keberhasilan aplikasi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan fenomena pelaksanaan Program Raskin untuk tahun anggaran 2014 di Kabupaten Bekasi khususnya di Kecamatan Cikarang Utara bahwa dalam penyaluran beras untuk rumah tangga miskin masih ditemui berbagai kendala-kendala. Dari observasi di lapangan

ditemukan berbagai masalah dalam kelancaran pelaksanaan program penyaluran Raskin seperti kedisiplinan dalam penyaluran beras Raskin dari semua petugas ataupun pihak pemerintah sehingga penyalurannya bantuannya dapat dioptimalkan. Hasil pengamatan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan program penyaluran beras untuk rumah tangga miskin Raskin belum seluruhnya efektif, terutama keterlambatan pembayaran dan pendistribusian raskin serta kualitas beras yang merupakan suatu permasalahan dari kebijakan pemerintah. Apalagi dilihat dari aspek penyaluran, jumlah kelompok sasaran, volume beras tidak sesuai dengan jumlah RTS-PM yang ada di wilayah dan harganya rentang terhadap kesediaan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipastikan bahwa belum optimal memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan hidup keluarga miskin, khususnya di Kecamatan Cikarang Utara.

Menurut Frank Ellis pada (Framita, 2020:58) menyatakan bahwa kemiskinan mempunyai banyak sekali dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial- psikologis. Orang diklaim miskin bila pada kadar tertentu asal daya ekonomi yang mereka miliki pada bawah target atau patokan yang telah dipengaruhi. yang dimaksud dengan kemiskinan sosial artinya kurangnya jaringan sosial serta struktur sosial yang mendukung orang untuk menerima kesempatan-kesempatan supaya produktivitasnya meningkat. bisa juga dikatakan bahwa kemiskinan sosial ialah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor penghambat sebagai akibatnya mencegah serta menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Penentuan kriteria penerima raskin seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan

memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/ Kelurahan.

Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Sampai dengan tahun 2006, data penerima manfaat raskin masih menggunakan data BKKBN yaitu data keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera, belum seluruh KK miskin dapat dijangkau oleh Raskin. Hal inilah yang menjadikan Raskin sering dianggap tidak tepat sasaran, karena rumah tangga sasaran berbagi dengan KK miskin lain yang belum terdaftar sebagai sasaran, (Zainudin, 2020:85).

Beberapa kendala dalam pelaksanaan program Raskin selama ini terutama dalam pencapaian ketepatan indikator maupun ketersediaan anggaran, sampai dengan saat ini, jumlah beras yang akan disalurkan baru ditetapkan setelah anggarannya tersedia. Selain itu, ketetapan atas jumlah beras raskin yang disediakan juga tidak selalu dilakukan pada awal tahun dan sering dilakukan perubahan dipertengahan tahun karena berbagai faktor. Hal ini akan menyulitkan dalam perencanaan persiapan stoknya, perencanaan pendanaan dan perhitungan biaya-biayanya, (Hasan, 2020:164).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya adalah Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin Dan Upaya Kesejahteraan Masyarakat Miskin. sikap atau kecenderungan para pelaksana dengan sub indikator menerima adanya program kebijakan raskin, dan menolak adanya program kebijakan raskin. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dengan indikator koordinasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik dengan indikator lingkungan eksternal yang mempengaruhi.

SIMPULAN

Keberhasilan pembangunan kesejahteraan untuk seluruh rakyat ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup permasalahan kesejahteraan ini semakin kompleks baik karena adanya faktor struktur penduduk, maupun faktor yang ditumbuhkan oleh intervensi dan inovasi pembangunan.

Upaya pemerintah memberikan perhatian yang serius dan sangat besar terhadap penanggulangan kemiskinan, sehingga penanggulangan kemiskinan berupaya dilakukan secara dan simultan oleh pemerintah bersama masyarakat sehingga pemerintah mencanangkan salah satunya adalah program bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga

Pemerintah Kecamatan Cikarang Utara melalui Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaannya melakukan upaya sosialisasi terus menerus mengenai keberhasilan pembangunan kesejahteraan kepada penerima manfaat, khususnya di daerah-daerah apabila mengalami kendala dan bekerja sama dengan aparat tingkat kelurahan sampai desa-desa penerima bantuan Raskin.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/09/22/bulog-mencatatkan-telah-serap-1-juta-ton-beras-dari-petani-lokal?page=all>

Hutasoit, P. R. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Pasar Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Analisis Kesadahan Total Dan Alkalinitas Pada Air Bersih Sumur Bor Dengan Metode Titrimetri Di Pt Sucofindo Daerah Provinsi Sumatera Utara, 44–48.

Framita, D. Y. (2020). Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents, 12–26.

Masyhuri Dan Zainudin, 2020. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif. Bandung.

Kementerian Hukum Dan Ham. (2015). Peraturan Pemerintah Tentang Ketahanan Pangan. Peraturan Pemerintah Tentang Ketahanan Pangan, 8. Retrieved From Http://Www.Bulog.Co.Id/Dokumen/Pp/Pp_17_2015_Kpg.Pdf